



### 2.3. Permasalahan Pembangunan Kalimantan Tengah

Setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan, memiliki permasalahan yang berbeda menurut dimensi maupun kurun waktu. Permasalahan yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya akan menjadi fokus utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam penyusunan program kegiatan dan arah kebijakan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan pokok, global, dan menyeluruh baik dari segi wilayah maupun waktu karena permasalahan tersebut terus muncul berdampingan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator dalam melihat permasalahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperhatikan kesenjangan antara kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dicapai saat ini dengan target pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada kondisi atau gambaran umum daerah sekaligus evaluasi kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 antara lain permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi untuk permasalahan yang ada. Penuntasan dan penyelesaian permasalahan merupakan esensi dari tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan daerah melalui perencanaan



pembangunan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah, mengingat permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks dan multidimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan ini nantinya akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang tepat, relevan, efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di masa lalu untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan.

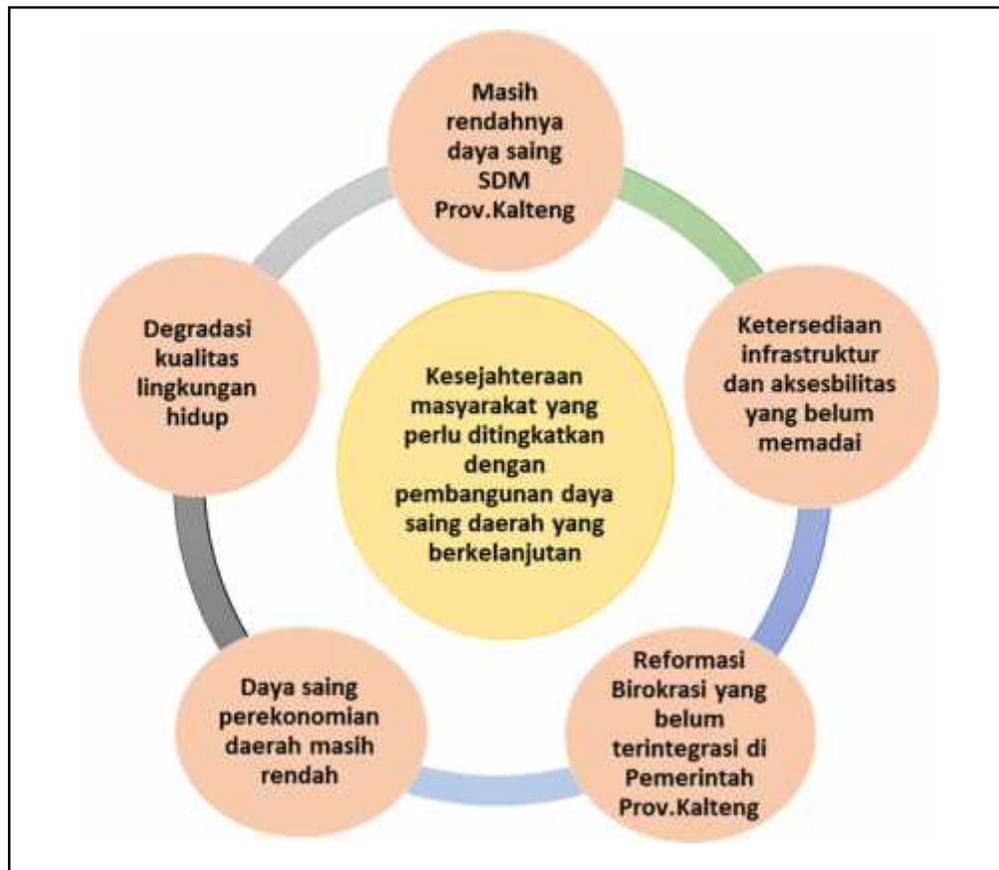
Identifikasi permasalahan dapat diverifikasi dari informasi dan kinerja yang telah dicapai sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada bab gambaran umum kondisi daerah. Segala perbandingan perihal apa yang telah dicapai terhadap standar dan rencana atau dengan melakukan *benchmarking*, dapat diketahui berbagai kinerja pembangunan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, pemahaman berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan akan terdeteksi melalui kajian dan analisis indikator kinerja pemerintah.

Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **“Kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh beberapa permasalahan pokok Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Daya saing perekonomian daerah masih rendah;
3. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai;
4. Reformasi Birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah:

Gambar 2.21  
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah



Pengelolaan potensi sumber daya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan realisasi perumusan sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi daerah) dalam penyelenggaraan efisiensi pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi baik sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan pencapaian pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam menentukan perencanaan kebijakan yang disempurnakan dengan berbagai tahapan evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Permasalahan pokok pembangunan daerah akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

#### 1) **Masih rendahnya daya saing kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset dasar dalam pencapaian pembangunan nasional melalui peningkatan dan pemberdayaan kualitas subyek pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia akan menjadi penentu utama dalam pergerakan capaian pembangunan. Setiap program kegiatan baik yang



direncanakan, dilaksanakan, hingga evaluasinya merupakan domain sumber daya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkualitas mutlak menjadi modal dasar optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor perekonomian daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing, secara otomatis akan meningkatkan ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mendorong tercapainya target pada segala aspek pembangunan. Peningkatan daya saing akan menginterpretasikan penyerapan tenaga kerja yang diikuti dengan maksimalnya kualitas hasil pekerjaan.

Sehubungan hal tersebut di atas, permasalahan “Masih rendahnya daya saing kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah”, erat kaitannya dengan capaian indikator pembangunan, antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup, tingkat pengangguran.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel di bawah ini:

**Tabel 2.29**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Masih rendahnya Daya saing kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah”**

Permasalahan	Akar Permasalahan
Masih rendahnya Daya saing kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal</li> <li>2. Kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Tingginya penduduk yang menghuni perumahan tidak layak baik dari segi bangunan, sanitasi, maupun lingkungan</li> <li>4. Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular</li> <li>5. Pengangguran rendah, tetapi sebagian besar merupakan tenaga kerja di sektor pertanian (terlebih lagi persentase tenaga kerja menurut jenjang pendidikan tertinggi adalah SD ke bawah)</li> <li>6. Masih perlu peningkatan dan pemeliharaan kerukunan hidup serta toleransi antar suku, ras, dan agama yang berkelanjutan</li> </ol>



## 2) Pemerataan daya saing perekonomian daerah masih rendah

Trend positif ditunjukkan oleh perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan yang relatif stabil pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi potensi bagi peningkatan perekonomian provinsi utamanya pada sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan, ataupun pertambangan dan penggalian. Dalam skala Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian memang berkembang dari tahun ke tahun, namun perlu digarisbawahi terkait pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wilayah regional administrasi masih kurang efisien dalam pergerakan roda perekonomian wilayah utamanya daerah terpencil/terpelosok.

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan yang menyebabkan secara kumulatif pembangunan daerah berjalan tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu memberi perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan ekonominya.

Dari Permasalahan “**Daya saing perekonomian daerah masih rendah**“, beberapa indikator terkait antara lain: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, tingkat kemiskinan.

## 3) Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah geografis yang cukup sulit dan terjal sehingga pembangunan daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki berbagai kendala. Dengan melihat kondisi geografis, akses infrastruktur serta sarana prasarana pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, program peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya merata. Pemerataan kualitas sumber daya manusia ini diperlukan agar seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan taraf hidup yang akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Minimnya infrastruktur dan aksesibilitas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah dirasakan oleh penduduk terutama di wilayah pedesaan yang merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pedesaan harus terus dikembangkan terutama dalam pembangunan sektor pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan harus ditingkatkan dengan dukungan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.



Dari Permasalahan “Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai”, indikator pembangunan yang terkait antara lain: kondisi jalan, kondisi kelistrikan, pengeluaran konsumsi per kapita per bulan, gini ratio, upah minimum untuk tenaga kerja (UMP).

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.30**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai”**

Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum memadainya Infrastruktur dasar dan aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksesibilitas wilayah masih belum sepenuhnya terjangkau sehingga belum terwujud adanya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi hingga ke seluruh wilayah</li> <li>2. Andil terbesar dalam perekonomian Kalteng adalah sektor pertanian, namun penyediaan infrastruktur penunjang pertanian belum sepenuhnya diperhatikan</li> <li>3. Persebaran penduduk yang tidak merata diakibatkan salah satunya karena ketersediaan infrastruktur kehidupan yang layak masih belum terpenuhi</li> <li>4. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penghubung antar daerah (terlebih lagi wilayah kalteng yang luas dan distribusi penduduk yang terpencar-pencar jauh hingga pelosok pedalaman)</li> </ol>

#### 4) Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat



diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1. Opini BPK
2. Indeks Demokrasi Indonesia
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi
5. Penindakan kasus korupsi

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah merupakan salah satu patologi birokrasi yang harus diberantas. Begitu pula di Kalimantan Tengah, KKN harus menjadi perhatian utama oleh bidang terkait agar jumlah kasus KKN dapat diminalisir. Pencegahan KKN dapat dilakukan dengan fokus pada monitoring pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak ada celah bagi aparatur negara untuk melakukan praktek KKN. Data yang ada menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah kasus penindakan KKN yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan, yakni pada tahun 2014 terjadi 12 kasus jika dibandingkan dengan Provinsi lain se regional Kalimantan seperti di Kalimantan Selatan terjadi 3 kasus, Kalimantan Timur 4 kasus, disusul dengan Kalimantan Barat 8 kasus.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel di bawah ini:

**Tabel 2.31**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”**

Permasalahan	Akar Permasalahan
Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya mengintegrasikan <i>good government</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya koordinasi antara pemprov dengan pemerintah kab/kota karena adanya sistem desentralisasi (kurang pahamnya esensi dari otonomi daerah)</li> <li>2. Peningkatan pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal yang belum direalisasikan secara optimal</li> <li>3. Rendahnya pengawasan dan transparansi dalam birokrasi (mencegah KKN)</li> <li>4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah</li> </ol>



## 5) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Sejak tahun 1997, kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan tengah selalu berulang dengan tingkatan intensitas yang semakin meningkat, terutama pada tahun 2014 dan 2015. Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.48/536/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan jumlah hotspot yang meningkat, nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada pada rentang membahayakan (>350 PM), serta jarak pandang yang terbatas.

Luas lahan yang terbakar hingga Oktober 2015 mencapai 10,015 Ha, meningkat 61,59% dibandingkan tahun 2014, dan telah berhasil dipadamkan seluas 4.021 Ha. Sedangkan tahun 2014 tercatat luas lahan terbakar adalah 6.197 Ha dan berhasil dipadamkan seluas 2.239 Ha. Sedangkan jumlah hotspot cenderung meningkat mulai bulan Juli sampai bulan Oktober. Total hotspot bulan Oktober 2015 telah mencapai 5.176 titik. Kenaikan luas lahan yang terbakar juga dipicu oleh rendahnya curah hujan pada bulan Agustus dan September 2015 yaitu rata-rata 23 mm dan 0.1 mm.

Kabut asap akibat kebakaran hutan ini berdampak pada seluruh sektor di Kalimantan Tengah diantaranya sektor ekonomi, tingkat inflasi, kesehatan dan pendidikan. Berikut kajian tentang dampak kabut asap:

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dengan pangsa terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu mencapai 23,75%. Adanya bencana kabut asap tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi dua komoditas perkebunan utama di Kalimantan tengah yaitu, kelapa sawit dan karet. Namun, menurut informasi anekdotal yang diperoleh, pada bencana kabut asap tahun 2015 terdapat 321.55 Ha lahan kelapa sawit dan 223,52 Ha lahan karet yang ikut terbakar dengan kerugian mencapai 9,3 Milyar rupiah. Sementara untuk subsektor holtikultura menunjukkan adanya penurunan hasil panen akibat bencana kabut asap sebesar 30-40 juta rupiah tiap petani.

Bencana kabut asap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor pertambangan. Berdasarkan data Southern Oscillation Indeks level pada tahun 2015 terjadi fenomena El Nino yang cukup parah sehingga diperkirakan



fenomena ini akan membuat debit air sungai menurun dan kinerja sektor pertambangan ikut menurun.

Sektor perdagangan, hotel dan restaurant merupakan salah satu sektor yang mengalami persentase kerugian yang cukup tinggi akibat bencana kabut asap. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada angka rata-rata occupancy rate perhotelan sebesar 10-15% di Kalimantan Tengah dengan kerugian sebesar 2,07 Milyar rupiah.

Dengan penurunan kegiatan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi, maka bencana kabut asap selama bulan September 2015 diperkirakan akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi tahunan Kalimantan Tengah sebesar 0,04% - 0,10%.

b. Inflasi (IHK)

IHK Kalimantan Tengah pada bulan Agustus dan September 2015 mengalami deflasi akibat kabut asap. Deflasi pada IHK Kalimantan Tengah di bulan Agustus dan September masing-masing sebesar -0,28% dan -0,20% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan pola historis IHK Kalimantan Tengah pada periode yang sama yaitu 0,54% (mtm) dan 0,21% (mtm). Berdasarkan tujuh kelompok komoditas penyusun IHK, deflasi yang terjadi lebih didorong oleh kelompok bahan makanan.

c. Kesehatan

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus dan September 2015 terdapat peningkatan pada jumlah Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) di wilayah Kalimantan Tengah. Total penderita ISPA pada bulan Agustus s.d September 2015 adalah 21.905 jiwa. Selain ISPA yang perlu diperhatikan adalah adanya kecenderungan kenaikan jumlah penderita diare menjadi 8.165 jiwa pada bulan Agustus s.d September 2015. Kondisi ini disebabkan karena kabut asap berpengaruh terhadap penurunan kualitas air.

d. Pendidikan

Dampak kabut asap terhadap pendidikan Kalimantan Tengah cukup signifikan dimana ribuan siswa/siswi tingkat SD s/d SMA di beberapa kabupaten/kota diliburkan pada tanggal 10 September – 1 Oktober 2015 dan diperpanjang hingga 24 Oktober 2015. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan siswa/siswi di Kalimantan Tengah dan memberikan beban yang lebih besar bagi



siswa/siswi SMA yang akan mengikuti seleksi ujian nasional perguruan tinggi. Akibat bencana kabut asap diperkirakan kualitas hasil pendidikan tahun 2015 akan menurun dibandingkan dengan tahun 2014.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak ijin-ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah tersebar pada beberapa kawasan. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000 Ha. Perkebunan karet tersebar hampir di semua kawasan. Sedangkan potensi tambang batubara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.

Selain mempunyai nilai ekonomi, potensi sumber daya alam juga mempunyai nilai daya dukung lingkungan yang strategis. Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mencapai luas sekitar 3 juta hektar dengan kandungan gambut sekitar 6,3 giga ton merupakan ekosistem yang perlu dilindungi karena berfungsi sebagai sumber air dan sumber plasma nutfah yang sangat berharga. Selain itu kawasan gambut juga berfungsi penting sebagai penahan emisi karbon yang jika terusik dan rusak akan berdampak terhadap perubahan iklim global.

Kawasan lainnya yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan penting adalah kawasan *Heart of Borneo* (HoB). Inisiatif *Heart of Borneo* (Jantung Borneo) adalah sebuah inisiatif yang dirancang sebagai program pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di Pulau Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja *HoB* membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya. Wilayah kerja ini melintasi wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam meliputi areas seluas kira-kira 22 juta hektar yang secara ekologis saling terhubung. Jika pola pendayagunaan sumber daya alam terus berlanjut seperti sekarang yang cenderung



tidak terkendali maka berbagai kawasan seperti kawasan lahan gambut dan kawasan HoB serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tak ternilai akan terancam serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

**Tabel 2.32**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup”**

Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum optimalnya upaya penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan terbatasnya sumber air di lokasi kebakaran.</li> <li>2. Peralatan dan SDM serta anggaran yang belum memadai</li> </ol>
Belum terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung ekonomi berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengendalian perizinan pembukaan lahan yang belum sesuai asas berkelanjutan</li> <li>4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang belum optimal dan belum tertangani secara sistematis dan komprehensif</li> </ol>
Belum efisiennya pendayagunaan sumber daya alam (nilai tambah produksi masih rendah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Implementasi penggalian sumber daya alam yang masih belum menerapkan asas ekonomi berkelanjutan</li> </ol>

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

Identifikasi permasalahan pembangunan dari kebijakan nasional/provinsi dan dinamika lingkungan eksternal lainnya adalah sebagaimana tabel 2.33 berikut:



**Tabel 2.33**  
**Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya**

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat kedaulatan pangan (menjaga ketersediaan bahan pokok) dan energy	Penyediaan infrastruktur dasar, transportasi, pengairan, hingga kelistrikan	Infrastruktur yang menghubungkan antar provinsi, terutama di wilayah antar provinsi di Kalimantan masih terbatas
2.	Percepatan pengurangan kemiskinan	Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam local	Komitmen internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global
3.	Upaya untuk meningkatkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan (keadilan, pemerataan, dan rasa memiliki) → <i>inclusive development</i>	Masih banyaknya desa tertinggal dan wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari akses pelayanan umum	Masalah tata batas antar provinsi dan pengembangan daerah perbatasan antar provinsi
4.	Perlunya meningkatkan <i>added value</i> pemanfaatan potensi dan peluang seperti sumber daya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar	Sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah antar bidang pembangunan	Keberpihakan terhadap pembangunan di Kalimantan yang masih kurang menimbulkan kesenjangan wilayah, padahal sumber daya alam cukup melimpah, akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan daerah penghasil
5.	Pembangunan berkelanjutan ( <i>pro-environment</i> )	Penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai percontohan REDD+ (REDD Plus), perlu kejelasan tata ruang, kelembagaan, monitoring dan evaluasi,dll	Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu tentang kelestarian lingkungan hidup